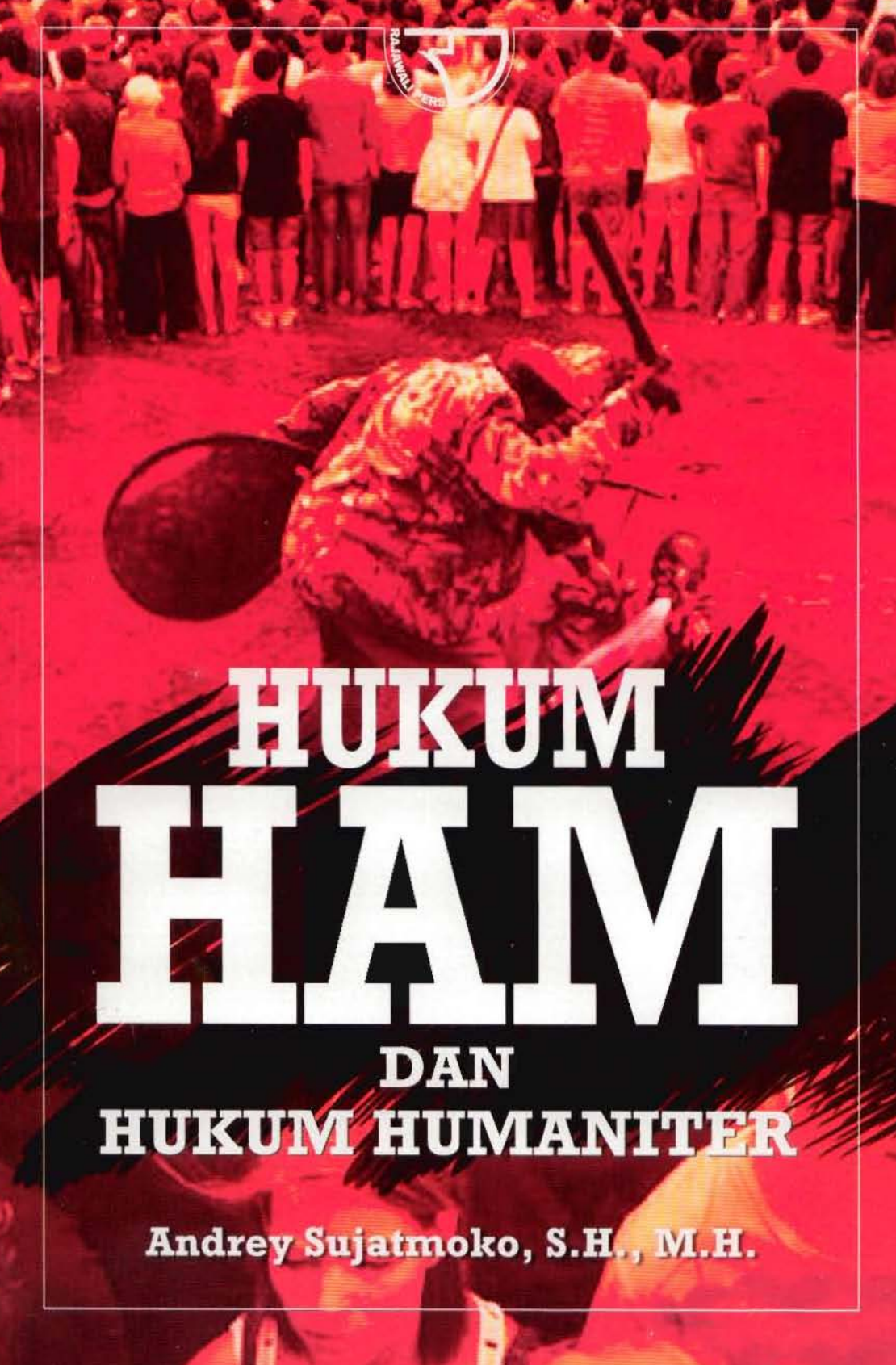




HUKUM HAM

DAN HUKUM HUMANITER

Andrey Sujatmoko, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PAKAR HUKUM HUMANITER	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB 1. SEJARAH, TEORI, PRINSIP, DAN KONTROVERSI HAM	1
A. Pengantar	1
B. Latar Belakang dan Sejarah HAM	2
C. Teori-teori HAM	7
D. Prinsip-prinsip HAM	10
E. Hukum HAM Internasional dan Individu	12
F. Universalitas dan Partikularitas HAM	19
Daftar Pustaka	22
BAB 2. KONTEKS HAM DAN PELANGGARAN HAM	25
A. Pendahuluan	25
B. HAM dan “Kewajiban Asasi Manusia”	26
C. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Berat HAM	30
D. Kesimpulan	36
Daftar Pustaka	37

BAB 3. PENEGAKAN HUKUM HAM DI TINGKAT NASIONAL DAN INTERNASIONAL	39
A. Pengantar	39
B. Penegakan di Tingkat Nasional (di Indonesia)	40
C. Penegakan Melalui Penerapan Prinsip Yurisdiksi Universal	43
D. Penegakan di Tingkat Internasional	45
E. Penutup	52
Daftar Pustaka	53
BAB 4. PENAHANAN (<i>DETENTION</i>) DAN PENYIKSAAN (<i>TORTURE</i>) DALAM HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL	55
A. Pengantar	55
B. Istilah dan Definisi HAM	57
C. Hukum HAM Internasional	57
D. Kewajiban Negara Terhadap Hak Asasi Manusia	59
E. Penahanan (<i>Detention</i>)	59
F. Penyiksaan (<i>Torture</i>)	63
Daftar Pustaka	66
BAB 5. PENGADILAN CAMPURAN ("HYBRID TRIBUNAL") SEBAGAI FORUM PENYELESAIAN KEJAHATAN INTERNASIONAL	67
A. Pengantar	67
B. Pokok Pembahasan	69
C. Bentuk-bentuk Pengadilan Internasional	70
D. Pengadilan Campuran (<i>Hybrid Tribunal</i>)	73
E. Prospek Pengadilan Campuran	80
Daftar Pustaka	81

BAB 6. COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN AD HOC HUMAN RIGHTS COURT IN INDONESIA AND SPECIAL PANELS FOR SERIOUS CRIMES IN EAST TIMOR	83
A. Historical Background	83
B. Post the Ballot Reports in East Timor	86
C. Analysis of the Type of Crimes	92
D. Ad Hoc Human Rights Court in Indonesia	96
E. Special Panels for Serious Crimes in East Timor	99
F. Comparative Analysis	104
G. Conclusion and Recommendation	113
Bibliography	114
BAB 7. BEBERAPA CATATAN MENGENAI PELANGGARAN BERAT HAM PASCA JAJAK PENDAPAT DI TIMOR TIMUR TAHUN 1999	119
A. Pengantar	119
B. Pokok Pembahasan	120
C. Laporan Hasil Investigasi	120
D. Hasil Proses Hukum di Pengadilan HAM <i>Ad Hoc</i>	128
E. Kejahatan Kemanusiaan dalam Hukum Internasional	129
F. Kesimpulan dan Rekomendasi	132
Daftar Pustaka	133
BAB 8. PELANGGARAN BERAT HAM DALAM "KASUS TRISAKTI"	135
BAB 9. KEMERDEKAAN KOSOVO DAN KAITANNYA DENGAN "RIGHT TO SELF-DETERMINATION"	139
A. Pengantar	139
B. Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri (<i>Right to Self-Determination</i>) dalam Hukum Internasional	140

C. Masalah Pengakuan (<i>Recognition</i>) dalam Hukum Internasional	144
D. Kemerdekaan Kosovo atas Serbia dalam Perspektif Hukum Internasional	146
E. Penutup	151
Daftar Pustaka	152
BAB 10. KEKERASAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA	155
A. Pengantar	155
B. Ringkasan Kasus Kekerasan di Negara Bagian Arakan	159
C. Pelanggaran HAM Terhadap Etnis Rohingya dan Hak-hak yang Dilanggar	160
D. Tanggung Jawab Negara Myanmar Menurut Hukum Internasional	164
E. Kesimpulan dan Saran	166
Daftar Pustaka	168
BAB 11. ISTILAH, DEFINISI, DAN PENGERTIAN HUKUM HUMANITER	169
A. Istilah Hukum Humaniter	169
B. Definisi dan Pengertian Hukum Humaniter	171
C. Saat Berlakunya Hukum Humaniter	173
Daftar Pustaka	175
BAB 12. HUBUNGAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	177
A. Pengantar	177
B. Perbedaan Hukum HAM dan Hukum Humaniter	181
C. Definisi dan Ruang Lingkup Perlindungan HAM	182
D. Perlindungan HAM dalam Hukum HAM dan Hukum Humaniter	185

E. Penutup	191
Daftar Pustaka	191
BAB 13. KONVENSI DEN HAAG IV 1907 TENTANG HUKUM DAN KEBIASAAN PERANG DI DARAT	193
A. Konferensi Perdamaian dan Konvensi Den Haag 1907	193
B. Beberapa Ketentuan Penting dalam Konvensi Den Haag IV 1907	199
Daftar Pustaka	205
BAB 14. TANGGUNG JAWAB NEGARA, INDIVIDU, DAN KOMANDO MENURUT HUKUM INTERNASIONAL	207
A. Tanggung Jawab Negara	207
B. Tanggung Jawab Negara atas Pelanggaran HAM	209
C. Tanggung Jawab Individu dan Komando	214
D. Penutup	226
Daftar Pustaka	227
BAB 15. IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW ON THE USE OF THE RED CROSS EMBLEM IN INDONESIA AND AUSTRALIA	231
A. Introduction	231
B. Legal Basis of the Emblems	233
C. The Use of the Emblem in Indonesia	235
D. The Use of the Emblem in Australia	237
E. Epilogue	240
Bibliography	241
LAMPIRAN	243
INDEKS	277
BIODATA PENULIS	281